

**KINERJA ORGANISASI DALAM PENATAUSAHAAN ASET
TETAP DI KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

SETIO DAFA SYAFALA

NIM. 07011281722053

Konsentrasi Manajemen Sektor Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen dalam sebuah organisasi merupakan hal utama untuk mengelola dan mengkoordinasi sumber daya manusia dan materialnya. Terry dalam Wijaya dan Rifa'I (2016:25) mengemukakan bahwa *“management provides effectiveness to human efforts. It helps achieve better equipment, plants, offices, products, services and human relations”*. Pendapat ini menjelaskan pentingnya peranan manajemen dalam mencapai efektivitas usaha manusia terutama untuk membantu pencapaian yang lebih baik dalam mendayagunakan peralatan, lahan, kantor, produk, pelayanan dan hubungan manusia dalam organisasi. Dalam organisasi terdapat manajer organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, baik untuk hasil sekarang maupun untuk potensi masa mendatang. Dalam konteks manajerial, para manajer melaksanakan fungsi-fungsi dasar yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Siagian dalam Wijaya dan Rifa'I (2016:26) mengemukakan bahwa *“fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, pengawasan, dan penilaian”*. Setiap organisasi terkhususnya organisasi pemerintahan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukannya strategi yang dijabarkan dalam bentuk prosedur maupun program. Dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut diperlukannya peningkatan terhadap kinerja organisasi agar kegiatan atau program yang dilakukan organisasi sesuai dengan tujuan organisasi. Untuk meningkatkan kerja organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan kerja di bidangnya, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pendukung lain seperti sarana perlengkapan kerja dengan kata lain aset yang memadai. Penyediaan sarana perlengkapan kerja yang memadai sangat

diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Oleh karena itu pentingnya peningkatan kinerja organisasi terhadap pengamanan aset demi menunjang kinerja pegawai serta menjaga nilai aset sebagai kekayaan negara/daerah. Dengan demikian pemerintah daerah harus mengelolah aset atau barang milik daerah sebaik mungkin dan dituntut untuk membenahi sistem pengelolaan aset daerah dengan berpedoman pada regulasi dan Undang- undang yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.

Wujud nyata pemerintah dalam mengelola aset dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam peraturan ini pengelolaan aset bukanlah sekedar administrasi semata, tetapi membahas lebih dalam mengenai aset serta bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset negara/daerah. Kemudian dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tersebut diperdalam dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam peraturan ini menuntut pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Untuk menciptakan pengelolaan aset daerah yang lebih efektif dan efisien, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan wewenangnya membuat suatu peraturan daerah tentang pengelolaan aset daerah. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan peraturan tersebut pengelolaan barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Penatausahaan berperan penting dalam mengamankan aset daerah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penatausahaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dari kegiatan penatausahaan tersebut dimanfaatkan dalam rangka: a) Penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun; b) Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan aset setiap tahun, untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran; c) Pengamanan administrasi terhadap aset atau barang milik daerah. Manfaat penatausahaan aset tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manajemen pemerintahan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan wewenangnya menetapkan standar petunjuk dalam pengisian Kartu Inventaris Barang (KIB) yang mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah. Dalam standar tersebut menyatakan bahwa ada 6 jenis KIB yaitu: KIB A (tanah), KIB B (peralatan dan mesin), KIB C (gedung dan bangunan), KIB D (jalan, irigasi, dan jaringan), KIB E (aset tetap lainnya), dan KIB F (konstruksi dalam pengerjaan). Dari ke 6 jenis KIB tersebut memiliki standar isi yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Pengisian KIB A (Tanah)

KIB A terdiri dari 14 kolom, yaitu:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| a. Nomor Urut Pencatatan | d. Nomor Register |
| b. Jenis Barang>Nama Barang | e. Luas Tanah |
| c. Nomor Kode Barang | f. Tahun Pengadaan Tanah |

- g. Letak/Alamat
- h. Hak Pakai/Hak Pengelola
- i. Tanggal Sertifikat
- j. Nomor Sertifikat
- k. Penggunaan
- l. Asal Usul
- m. Harga
- n. Keterangan

2. Pengisian KIB B (Peralatan dan Mesin)

KIB B terdiri dari 16 kolom, yaitu:

- a. Nomor Urut
- b. Nomor Kode Barang
- c. Nama Barang/Jenis Barang
- d. Nomor Register
- e. Merk/Type
- f. Ukuran/CC
- g. Bahan
- h. Tahun Pembelian
- i. Nomor Pabrik
- j. Nomor Rangka
- k. Nomor Mesin
- l. Nomor Polisi
- m. BPKB
- n. Asal-usul
- o. Harga
- p. Keterangan

3. Pengisian KIB C (Gedung dan Bangunan)

KIB C terdiri dari 17 kolom, yaitu:

- a. Nomor Urut
- b. Jenis Barang>Nama Barang
- c. Nomor Kode Barang
- d. Nomor Register
- e. Kondisi Bangunan
- f. Konstruksi Bangunan
- g. Jenis Konstruksi Bangunan
(Beton/Tidak)
- h. Luas Lantai
- i. Letak/Lokasi
- j. Dokumen Gedung (Tanggal)
- k. Dokumen gedung (Nomor Dokumen)
- l. Tanah Bangunan (Luas Tanah)
- m. Tanah Bangunan (Status Tanah)
- n. Tanah Bangunan (Nomor Kode Tanah)
- o. Asal-Usul
- p. Harga

q. Keterangan

4. Pengisian KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan)

KIB D terdiri dari 17 kolom, yaitu:

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| a. Nomor Urut | j. Dokumen (Tanggal) |
| b. Jenis Barang | k. Dokumen (Nomor Dokumen) |
| c. Kode Barang | l. Status |
| d. Nomor Register | m. Nomor Kode (Dari Status) |
| e. Konstruksi | n. Asal-Usul |
| f. Panjang | o. Harga |
| g. Lebar | p. Kondisi |
| h. Luas | q. Keterangan |
| i. Letak/Lokasi | |

5. Pengisian KIB E (Aset Tetap Lainnya)

KIB E terdiri dari 16 kolom, yaitu:

- | | |
|--|--|
| a. Nomor Urut | i. Barang Bercorak Kesenian
(Spesifikasi Bahan) |
| b. Jenis Barang | |
| c. Kode Barang | j. Hewan/Ternak dan Tumbuhan
(Jenis) |
| d. Nomor Register | |
| e. Buku dan Perpustakaan
(Judul/Pencipta) | k. Hewan/Ternak dan Tumbuhan
(Ukuran) |
| f. Buku dan Perpustakaan
(Bahan) | l. Jumlah Barang |
| g. Barang Bercorak Kesenian
(jenis) | m. Tahun Cetak/Pembelian |
| h. Barang bercorak Kesenian | n. Asal-Usul |
| | o. Harga |
| | p. Keterangan |

Tabel 1 Rekapitulasi Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

1. Kartu Inventaris Barang A (Tanah)

No	Nama Barang	Kode Barang	Kode Register	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Hak	Tanggal Sertifikat	Sertifikat	Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	01.01.1 1.01.01	0001	1.032	2005	Tertera	Hak Pakai	4/8/1986	334/1986		Pembelian	xxx	ada
2	Tanah Bangunan Gedung	01.01.1 1.02.03	0001	510	1955	Tertera	Hak Pakai		Belum Sertifikat	Gudang II	Pembelian	xxx	ada
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	01.01.1 1.04.01	0001	6.210	2013	Tertera	Hak Pakai	8/25/2005			Pembelian	xxx	ada

Data olahan Kartu Inventaris Barang A (Tanah) di atas menunjukkan permasalahan dalam penatausahaan yaitu belum lengkapnya data baik itu bukti kepemilikan pada 2 tanah dan bangunan milik BPKAD Provinsi Sumatera Selatan maupun tanggal dan keterangan fungsi tanah dan bangunan tersebut.

2. Kartu Inventaris Barang B (Mesin dan Peralatan)

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Kode Register	Merke/Type	Ukuran /CC	Bahan	Tahun Pembelian	Bukti Kepemilikan	Asal Usul	Harga	Keterangan
1.	02.02.01.05.03	Dump Truck	1	0001			Bensin	2011	Ada	Ada	xxx	Ada
2.	02.02.03.04.04	Electric Generating Set Lain-Lain	1	0001				2015	Ada	Ada	xxx	Ada
3.	Ada	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	18	Ada		Ada		Ada	Ada	Ada	xxx	Ada
4.	Ada	Sepeda Motor	26	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	xxx	Ada
5.	Ada	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	7	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	xxx	Ada
6.	Ada	Scanner	7	Ada	Ada			Ada		Ada	xxx	Ada
7.	Ada	Rak Penyimpanan	10	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
8.	02.06.01.03.07	Mesin Foto Copy dengan Folio	1	0001	Ada			Ada		Ada	xxx	Ada
9.	02.06.01.03.08	Mesin Foto Copy dengan double Folio	2	Ada	Ada			Ada		Ada	xxx	Ada
10.		Lemari Besi	1					Ada		Ada	xxx	Ada
11.	Ada	Rak Besi/Metal	351	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
12.	Ada	Rak Kayu	7	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
13.	Ada	Filling Besi/Metal	64	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
14.	Ada	Lemari Kayu	2222	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
15.	Ada	Rak Kaca	2	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
16.	Ada	Alat Penghancur Kertas	15	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
17.	02.06.01.05.06	Papan Nama Intansi	1	0001				Ada		Ada	xxx	Ada
18.	Ada	Papan Nama Pengumuman	75	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
19.	Ada	White Board	5	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada

20.	Ada	Mesin Absensi	5	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
21.	Ada	Alat Kantor Lainnya	256	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
22.	Ada	Meja Besi	170	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
23.	Ada	Sekat Ruangan	21	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
24.	Ada	Kursi Besi	65	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
25.	Ada	Meja Rapat	27	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
26.	Ada	Meja Reseption	8	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
27.	Ada	AC Sentral	7	Ada	Ada			Ada		Ada	xxx	Ada

28.	Ada	AC Unit	10	Ada	Ada			Ada		Ada	xxx	Ada
29.	Ada	AC Split	62	Ada	Ada			Ada		Ada	xxx	Ada
30.	Ada	Kipas Angin	26	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
31.	Ada	Alat Rumah Tangga Lainnya	9531	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
32.	Ada	Alat Lainnya	64	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
33.	Ada	Speaker	61	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
34.	Ada	Alat Pemadam Kebaran	193	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
35.	Ada	Personal Komputer Lainnya	51	Ada	Ada			Ada		Ada	xxx	Ada
36.	Ada	Infokus	2	Ada	Ada			Ada		Ada	xxx	Ada
37.	Ada	PC Unit	102	Ada	Ada			Ada		Ada	xxx	Ada
38.	Ada	Laptop	28	Ada	Ada			Ada		Ada	xxx	Ada
39.	Ada	Note Book	15	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
40.	Ada	Printer	114	Ada	Ada			Ada		Ada	xxx	Ada
41.	Ada	Monitor	3	Ada	Ada			Ada		Ada	xxx	Ada
42.	Ada	Peralatan Jaringa	2470	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
43.	Ada	Telephone	33	Ada	Ada			Ada		Ada	xxx	Ada
44.	Ada	Meja Kerja Pejabat Eselon	22	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
45.	Ada	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	25	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
46.	Ada	Meja Kerja	13	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
47.	Ada	Meja Tamu Ruangan Biasa	2	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
48.	Ada	Kursi Kerja Pejabat Eselon	47	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
49.	Ada	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	108	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
50.	Ada	Lemari Arsip	51	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
51.	Ada	Mic Wireless	3	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada
52.	Ada	Alat Komunikasi Lainnya	26	Ada				Ada		Ada	xxx	Ada

Data olahan Kartu Inventaris Barang B (Peralatan dan Mesin) di atas menunjukkan permasalahan dalam penatausahaan yaitu belum lengkapnya data baik itu merk/type, ukuran, bahan, dan bukti kepemilikan hal tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan belum maksimal dalam mendata barang yang ada.

3. Kartu Inventaris Barang C (Gedung dan Bangunan)

No	Nama Barang	Jumlah	Kode Barang	Kode Register	Kondisi	Konstruksi Bangunan	Luas Lantai	Lokasi	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat	Luas (M ²)	Status Tanah	Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	Ada	Ada	Baik	Ada	Ada	Ada		Sebagian tidak ada nomor sertifikat	6.210	Tanah Milik Pemda Tanah Hak Pakai	Ada	Ada	xxx	Ada
2.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	03.11.01.02.01	0001	Baik	Ada	Ada	1/1/1980	007/Bun/2010	Ada				xxx	Ada	
3.	Bangunan Pagar Gedung Tempat Kerja Permanen	1	03.11.01.28.01	0001	Baik	Ada	Ada		Lap.01/WKN.4/03.02/2015	Ada				xxx	Ada	
4.	Rumah Negara Gol I Type A Permanen	2	Ada	Ada	Baik	Ada	Ada	Ada		Ada				xxx	Ada	
5.	Tugu Pembangunan dan Lain-lain	12	Ada	Ada	Baik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				xxx	Ada	

Data olahan Kartu Inventaris Barang C (Gedung dan Bangunan) di atas menunjukkan permasalahan dalam penatausahaan yaitu belum lengkapnya data baik itu data mengenai sertifikat seperti tanggal dan nomor sertifikat, luas gedung dan bangunan yang dibuat menjadi 1 hal tersebut menyulitkan untuk mengetahui luas gedung dan bangunan dari masing-masing gedung dan bangunan yang ada, dan data kode tanah tidak lengkap.

4. Kartu Inventaris Barang D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan)

No	Nama Barang	Kode Barang	Kode Register	Konstruksi	Panjang (KM)	Lebar (M)	Luas (M ²)	Alamat	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat	Status Tanah	Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Kondisi	Keterangan
1.	Jalan Distribusi Lain-lain	04.16.02.02.04	0001					Ada					Pembelian	xxx	Baik	Ada
2.	Jaringan Telepon di Atas Tanah Lain-lain	04.16.03.01.04	0001					Ada	2/9/2018	900/014/SPK/BPKAD/2018			Pembelian	xxx	Baik	Ada

Sumber: Data Olahan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2019 milik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Data olahan Kartu Inventaris Barang D (Jalan, irigasi, dan jaringan) di atas menunjukkan permasalahan dalam penatausahaan yaitu belum lengkapnya data baik itu konstruksi, panjang, lebar, luas, tanggal sertifikat, nomor sertifikat, status tanah, kode tanah. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya kinerja organisasi dalam mendata aset tetap.

Hal yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini ialah ketidaklengkapan data administrasi pada penatausahaan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dapat berpengaruh pada keakuratan nilai aset yang tersaji di neraca pemerintahan daerah, padahal keakuratan nilai aset sangat mendukung dalam pemberian opini BPK. Selain itu hal ini menyebabkan pemerintah daerah dan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sebagai pengguna barang kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset tetap yang mana yang digunakan dengan baik, sehingga aset yang dikelola cenderung tidak optimal dalam penggunaannya, disisi lain pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset pada masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dengan adanya gejala-gejala yang ditemukan serta banyaknya opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah yang menyoroti tentang permasalahan aset tetap di berbagai dinas. Mengingat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai instansi pemerintah yang mengurus aset daerah berperan penting atas jalannya proses pengelolaan aset daerah yang ada di Sumatera Selatan maka perlu diteliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan kinerja penatausahaan aset tetap.

Dengan harapan hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan proses penatausahaan yang sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku demi terjaganya aset tetap milik daerah dengan penatausahaan yang berasaskan fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja organisasi dalam penatausahaan aset tetap di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pencapaian kinerja organisasi dalam penatausahaan aset tetap di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat pada penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan konsep penatausahaan aset tetap dan pengembangan konsep bagi ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan terutama dalam hal penatausahaan aset tetap dan diharapkan agar penggunaan barang menjadi lebih efektif dan efisien

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Edy, Sutrisno. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fahmi, Irham. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta
- Haryono, Siswoyo. 2018. *Manajemen Kinerja SDM Teori & Aplikasi*. Jakarta Timur: Luxima Metro Media.
- Kalang, Rosa P. 2020. *Handbook Tata Kelola Penatausahaan Inventarisasi (TKPI) BMN*. Papua: Politeknik Negeri Fakfak.
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Sedarmayanti, 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Strukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju
- Siregar, Doli. D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, Candra dan Muhammad, R. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.

B. Dokumen

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2009

C. Jurnal

- Aditama, P.B dan Nina, W. 2017. Analisis Kinerja Organisasi pada Kantor Kecamatan Blora. *Public Policy and Management Review*, 6(2): tanpa halaman.
- Aprianti, R.R., Dwi, R., dan Trias, A. Strategi Peningkatan Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Bogor. *Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(Nomor Khusus): 46-57.
- Hermawan, Ade. 2016. Kinerja Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Banjar. *Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2): 100-101.
- Izzat, N, Alfian., dan Mustam. 2017. Kinerja Organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam Pengelolaan Aset Tetap. *Administrasi Publik*.
- Kurniati, E., Thatok, A., dan Dudi, S. Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu Hingga Kini). *Jurnal Akuntansi*, 8(3): 50-51
- Manurung, L.J., Jullie, J.S., dan Novi, S.B. Evaluasi Penerapan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4):592-593
- Nengsih, Widya, M.Fachri Adnan, dan Fitri Eriyanti. 2019. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang. *Ilmu Administrasi Publik*, 2(1): 114-116.
- Ningsih, Nurna. 2017. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bosowa Terminal Indonesia di Samarinda. *Jurnal Administrasi Bisnis*. 5(4): 1358
- Nursanti, Fatimah, Firman Menne, dan Lukman Setiawan. 2018. Efisiensi dan efektivitas klinik akuntansi pada badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten takalar. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3): 33
- Qashdina dan Evayani. Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada Hotel-Hotel Berbintang Di Banda Aceh). *Ekonomi Akuntansi*, 3(1): 105.
- Rokhmadi, F.A., Lukman, M.B., dan Nirwan, R. Peningkatan Kinerja Manajemen Pengendalian Aset Tetap Kabupaten Purbalingga. *Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1): 48-57.
- Sihombing, N.S., Dwi, R., dan Ma'mun. S. Strategi Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola Aset Daerah Di Kabupaten Tapanuli Tengah. *Manajemen Pembangunan Daerah*, 8(1): 19-27.
- Syam, Shofiana. Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(2): 133

Yenni. 2018. Akuntansi Aset Tetap pada PT. XYZ di Medan. *Studi Akuntansi*, 7(1): 128

D. Skripsi dan Tesis

Dinar, Puspa. 2016. *Manajemen Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana, Universitas Terbuka.

Febryana, Fitria. 2017. *Kinerja Pegawai pada Subbag Umum Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Irawanti. 2008. *Kinerja Kerja Guru Pada SMP Negeri 1 Benteng Kabupaten Selayar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Hasanuddin

Khusnah, Basariyatul. 2017. *Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nisak, Danin Khoerun. 2017. *Pengaruh Prinsip Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Produktivitas Sekolah*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

Prayoga, Dimas. 2019. *Manajemen Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang*. Skripsi. Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Rahajeng, Angelina Deviani. 2018. *Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.

Zulkarnain. 2012. *Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas Organisasi di Kantor Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang*. Skripsi. Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa